

**TESIS**

**PEMBAGIAN HARTA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN CAMPURAN (PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1400 K/Pdt/2017)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna*

*Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**PEMBAGIAN HARTA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN CAMPURAN (PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1400 K/Pdt/2017)**

Fitri Ramadhani, 2120123016, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Tahun 2023.

**ABSTRAK**

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan yang berlangsung di luar negeri tersebut harus dicatatkan di Indonesia setelah pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kembalinya pasangan tersebut ke Indonesia. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada menurut peraturan perkawinan di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perkawinan campuran, bagaimana ketentuan hukum tentang harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang perkawinan campuran. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah termuat didalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan campuran yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang berlainan jenis yang tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah bergantung pada hukum di negara mana perkawinan itu di langsunkan sebagaimana asas *lex loci celebrationis*.

**Kata kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perjanjian Pisah Harta,  
Pencatatan Perkawinan**

**DISTRIBUTION OF PROPERTY AFTER A DIVORCE IN A MIXED MARRIAGE**  
**(IN SUPREME COURT RULING NUMBER 1400 K/Pdt/2017)**

Fitri Ramadhani, 2120123016, Master of Notary Affairs, Faculty of Law, Andalas University, 2023.

**ABSTRACT**

A mixed marriage is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws due to differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen. Marriages that take place abroad must be registered in Indonesia after the husband and wife return to Indonesia within one year after the couple's return to Indonesia. If a mixed marriage performed abroad is not registered in Indonesia, the marriage is deemed to have never existed according to Indonesian marriage regulations. The formulation of the problem in this research is how the legal arrangements for mixed marriages are, what are the legal provisions regarding joint marital property in Indonesia if there is a divorce in a mixed marriage that takes place outside Indonesia and whether the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 1400 K/Pdt/2017 have been in accordance with the provisions of the applicable law in the field of mixed marriages. This type of research is normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive where this research attempts to describe, explain and analyze the problems that arise, then look for the correct answer as a solution to these problems. The results of the discussion of the problems that arise in this research are that the legal regulation of mixed marriages that take place outside Indonesia is contained in Article 56 paragraph 1 and paragraph 2 as well as Article 57 and Article 60 paragraph 1 and paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. , where mixed marriage states that mixed marriage is a marriage between two people of different sexes who are subject to two different legal systems. Mixed marriages that take place outside Indonesia depend on the laws of the country where the marriage takes place according to the principle of *lex loci celebrationis*.

**Keywords: Mixed Marriages, Joint Property, Separation of Property Agreements, Marriage Registration**

